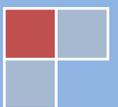


2021

# LAPORAN KINERJA

Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Triwulan I



## KATA PENGANTAR

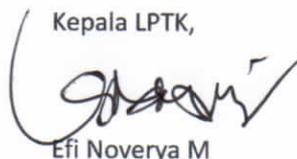
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya memberikan inspirasi dan semangat untuk menyelesaikan Laporan Kinerja Interim Triwulan I. Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LKj- LPTK) ini. Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan DIPA LPTK Wakatobi pada Triwulan I. Tahun Anggaran 2021 dan disusun sebagai implementasi Peraturan Presiden (PERPRES) No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja berkewajiban menyelenggarakan SAKIP dan pelaksanaannya disusun dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). LKj merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan a. rencana strategis; b. perjanjian Kinerja; c. pengukuran Kinerja; d. pengelolaan data Kinerja; e. pelaporan Kinerja; dan f. revidu dan evaluasi Kinerja. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

Laporan ini menyajikan hasil pencapaian kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan pada Triwulan I Tahun 2021. Semoga laporan ini bermanfaat meskipun masih terdapat kekurangan dalam hal cara penyajian dan sistematika penyusunan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan ke depan. Semoga Allah SWT berkenan memberikan perlindungan dan ridho-Nya atas semua upaya.

Wakatobi, April 2021

Kepala LPTK,

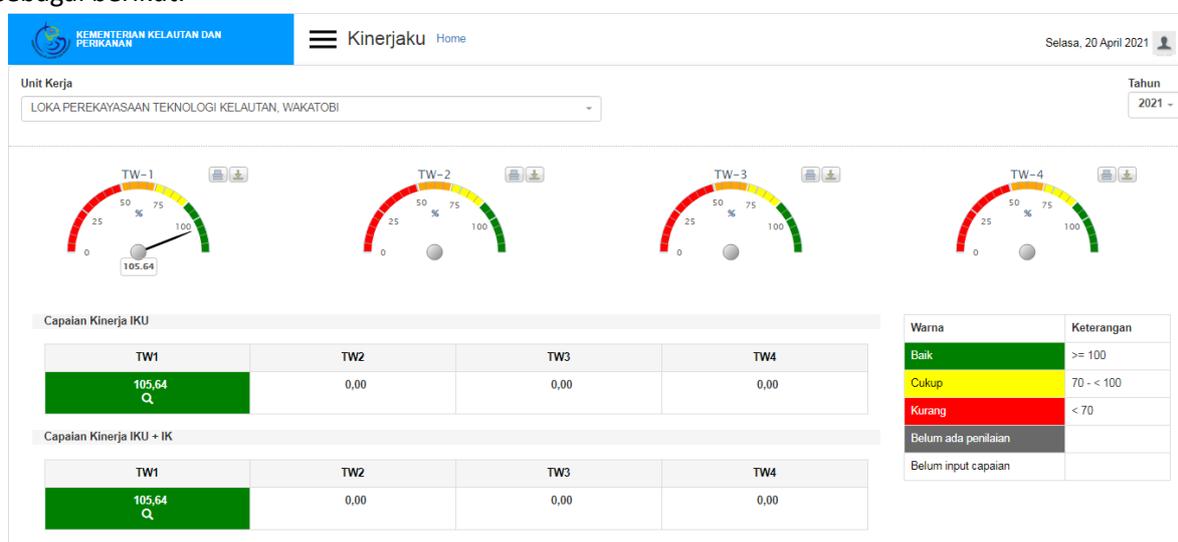


Efi Noverya M

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan perekayasa yang dilakukan oleh LPTK diarahkan untuk menjalankan fungsi pengembangan institusi, menciptakan inovasi dan pengembangan teknologi yang dilakukan melalui kerjasama lintas instansi, baik pemerintah maupun swasta. Sebagai institusi riset di bawah BRSDM KP, LPTK bertugas melakukan perekayasa di bidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. LPTK berkomitmen untuk mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam merencanakan program kerjanya sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.40/Men/2011 yang diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/Permen-KP/2018 yaitu: a. penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan; b. pelaksanaan perekayasa teknologi kelautan di bidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; c. pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama perekayasa teknologi kelautan di bidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pada Tahun 2021, LPTK memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 3 Sasaran Strategis dan 13 Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja LPTK Triwulan I Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator/KPI*) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LPTK pada Triwulan I Tahun 2021 sebesar 105,64%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 1. Dashboard Kinerjaku LPTK

Selama Triwulan I Tahun 2021, dari 13 IKU LPTK, terdapat 3 IKU yang memiliki capaian, sisanya akan diukur pada Triwulan selanjutnya. Rincian target dan realisasi dari 3 IKU tersebut adalah :

1. IKU Penerapan sistem pengetahuan terstandar pada satker LPTK (%) memiliki target triwulan I 84% namun dengan capaian 76.67%
2. IKU Rekomendasi hasil pengawasan satker LPTK yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen) memiliki target triwulan I 30 dengan capaian 100
3. IKU Nilai IKPA LPTK memiliki target triwulan 80 dengan capaian 100

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUJUAN
- C. TUGAS DAN FUNGSI
- D. KERAGAAN SDM
- E. SISTEMATIKA PELAPORAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. RENCANA KERJA TAHUNAN
- C. PENETAPAN KINERJA
- D. PENGUKURAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. PRESTASI KINERJA
- B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
- C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

BAB IV PENUTUP

- A. CAPAIAN KINERJA UTAMA
- B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Peraturan Presiden (PERPRES) No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja berkewajiban menyelenggarakan SAKIP dan pelaksanaannya disusun dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). LKj merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan a. rencana strategis; b. perjanjian Kinerja; c. pengukuran Kinerja; d. pengelolaan data Kinerja; e. pelaporan Kinerja; dan f. reviu dan evaluasi Kinerja. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

### **B. TUJUAN**

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja ini, bertujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada Triwulan I Tahun 2021.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi satuan kerja untuk meningkatkan kinerjanya.

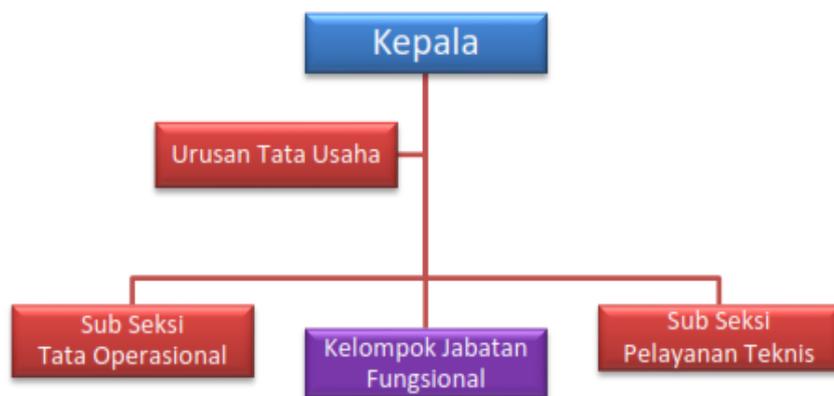
### **C. TUGAS DAN FUNGSI**

Loka Perencanaan Teknologi Kelautan, yang selanjutnya disebut LPTK, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Riset Kelautan (PRK) – Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP). LPTK memiliki tugas melakukan perencanaan teknologi kelautan dalam rangka mendukung visi BRSDM KP, yakni sebagai Inovator IPTEK dan Motilator Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan.

Kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh LPTK diarahkan untuk menjalankan fungsi pengembangan institusi, menciptakan inovasi dan pengembangan teknologi yang dilakukan melalui kerjasama lintas instansi, baik pemerintah maupun swasta. Sebagai institusi riset di bawah BRSDM KP, LPTK bertugas melakukan perencanaan di bidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. LPTK berkomitmen untuk mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam merencanakan program kerjanya sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.40/Men/2011 yang diubah dengan Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/Permen-KP/2018 yaitu: a. penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan; b. pelaksanaan perekayasaan teknologi kelautan di bidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; c. pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama perekayasaan teknologi kelautan di bidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

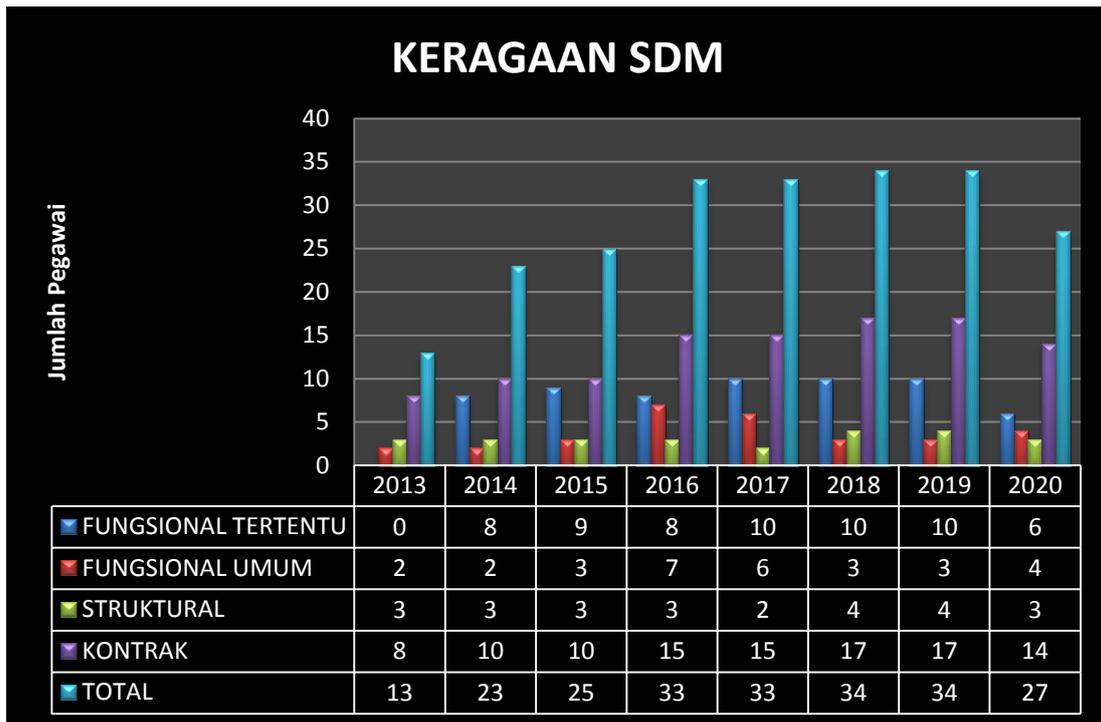
Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, LPTK dibantu oleh unit kerja dibawahnya yang terdiri dari a. Urusan Tata Usaha; b. Subseksi Tata Operasional; c. Subseksi Pelayanan Teknis; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, persuratan, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, serta tata laksana. Subseksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan. Subseksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, publikasi, diseminasi, kerjasama, dan pengelolaan prasarana dan sarana perekayasaan teknologi kelautan di bidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta perpustakaan. Sedangkan Kelompok fungsional mempunyai tugas melaksanakan: a. perekayasaan teknologi kelautan di bidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan b. kegiatan lainnya yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.



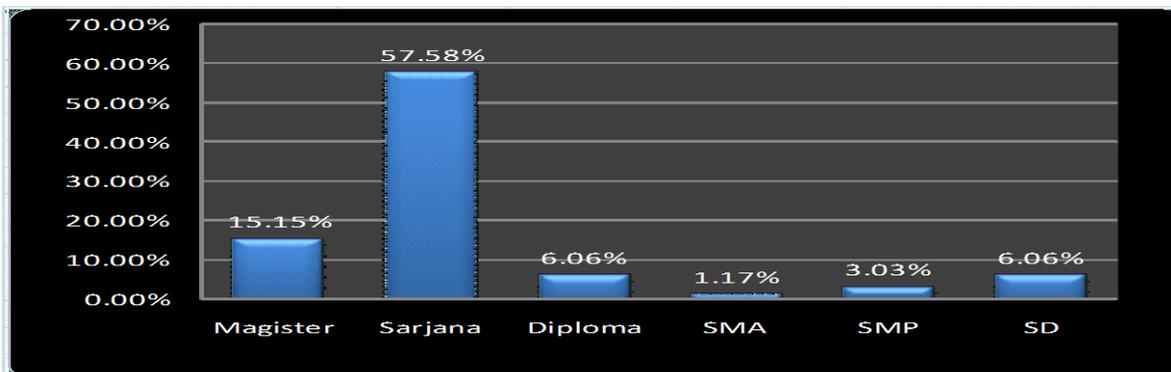
Struktur Organisasi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

#### D. KERAGAAN SDM

Jumlah Pegawai LPTK sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang dengan tingkat pendidikan dan disiplin ilmu yang beragam, terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf pelaksana. Jumlah pegawai LPTK yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebanyak 13 (tiga belas) orang, sedangkan 14 (empat belas) orang merupakan Pegawai Kontrak dengan latar belakang pendidikan dan mulai Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma dan Sarjana. Komposisi SDM LPTK dari tahun 2013 - 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :



Klasifikasi Pegawai LPTK Berdasarkan Jabatan



Klasifikasi Pegawai LPTK Berdasarkan Pendidikan

#### E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut :

1. **Ringkasan Eksekutif**, Pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Triwulan I tahun 2021
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang LPTK seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di LPTK

3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis LPTK 2019-2024, Rencana Kerja Tahunan, dan Penetapan kinerja LPTK Tahun 2021 serta Pengukuran Kinerja.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya
5. **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Loka Perencanaan Teknologi Kelautan (LPTK) tahun 2020-2024, mengacu pada Renstra Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) dan Pusat Riset Kelautan (Pusriskel). Visi BRSDM KP dan Pusriskel pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi BRSDM KP dan Pusriskel menjadi penting dengan keberadaan LPTK sebagai UPT pendukung untuk mencapai tujuan RPJMN tahap IV. Peran strategis keberadaan LPTK yaitu mendukung visi dan misi BRSDM KP dan Pusriskel melalui kegiatan perencanaan teknologi kelautan.

Peran strategis LPTK meliputi: 1) merumuskan perencanaan pembangunan KP nasional melalui penyediaan hasil perencanaan teknologi kelautan; 2) menyelenggarakan perencanaan teknologi kelautan yang mengikuti perkembangan era globalisasi dan ekonomi digital; 3) menghasilkan perencanaan teknologi kelautan inovatif dan implementatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; 4) melaksanakan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran; 5) melakukan sharing Knowledge Base Management System (BMS) dalam mengaplikasikan hasil perencanaan teknologi kelautan; 6) mewujudkan tata kelola perencanaan yang baik dan melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri; 7) Meningkatkan kontribusi PNBP (royalti dan Hak Kekayaan Intelektual/HAKI) melalui hasil perencanaan teknologi kelautan. Berdasarkan hal tersebut, LPTK melakukan penyusunan Renstra 2020-2024, untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pusriskel, BRSDM KP dan KKP serta sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 yaitu mewujudkan masyarakat sektor KP yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

##### 1. Visi

Visi LPTK pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi Pusriskel, BRSDM, dan KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

##### 2. Misi

Misi LPTK adalah menjalankan misi Presiden, KKP, BRSDM, dan Pusriskel dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, LPTK mendukung 4 (empat) misi yang merupakan modifikasi dari misi yang diemban oleh KKP, BRSDM, dan Pusriskel. Modifikasi dilakukan dengan penyesuaian kegiatan yang dilaksanakan oleh LPTK, yaitu :

1. Misi ke-1: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan.
2. Misi ke-2: Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan terhadap Perekonomian Nasional melalui Hasil Riset Kelautan.
3. Misi ke-4: Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan.
4. Misi ke-8: Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Riset Kelautan.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

### 3. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi LPTK, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

1. Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
2. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
3. Menghasilkan dan mengembangkan riset dan inovasi mendukung pembangunan berkelanjutan.
4. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

### 4. Sasaran Strategis

LPTK telah menetapkan 2 Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada tahun 2020-2024, setiap Sasaran Strategis memiliki satuan ukur pencapaian yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Hasil Riset dan Inovasi yang dimanfaatkan”, dengan indikator kinerja:

- Hasil riset kelautan yang dimanfaatkan oleh masyarakat/sector industri pada tahun 2020 1 paket menjadi 7 hingga tahun 2024.
- Prototipe alat dan mesin hasil riset inovasi teknologi kelautan pada tahun 2020 1 paket menjadi 8 paket hingga tahun 2024.
- Karya Tulis Ilmiah riset kelautan yang dipublikasikan 5 KTI pada tahun 2020, target total capaian KTI sampai dengan tahun 2024 adalah 28 buah KTI yang diterbitkan.
- Jejaring dan/atau kerjasama riset kelautan yang disepakati dan ditindaklanjuti pada tahun 2020 sebanyak 2 dokumen menjadi 15 dokumen hingga tahun 2024.
- Unit kerja riset kelautan yang ditingkatkan sarana dan prasarannya 1 unit pada tahun 2020 menjadi 3 unit hingga tahun 2024.

Sasaran strategis ke dua (SS-2) “Tatakelola pemerintahan yang baik” dengan indikator kinerja:

- Indeks Profesionalisme ASN LPTK bernilai 72 hingga tahun 2024.
- Unit kerja LPTK yang menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar, pada tahun 2020 sebesar 82%.
- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK adalah Baik (88) pada tahun 2020 sampai tahun 2024.
- Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK dibandingkan realisasi anggaran sebesar 1% setiap tahunnya dari 2020 sampai 2024.
- Nilai Kinerja Anggaran LPTK pada tahun 2020 sebesar 85 sampai tahun 2024

### 5. Potensi dan Permasalahan

#### a) Potensi

Keberadaan SDM dan IPTEK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan riset. Dengan SDM yang dimiliki serta gedung mekatronika kelautan dan Laboratorium Simlan kegiatan perekayasaan yang dilakukan oleh LPTK diarahkan untuk menjalankan fungsi pengembangan institusi, menciptakan inovasi dan pengembangan teknologi yang dilakukan melalui kerjasama lintas instansi, baik pemerintah maupun swasta.

b) Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi diantaranya :

- 1) Ketimpangan SDM manajerial dan teknis khususnya peneliti, perekayasa dan litkayasa yang masih dibawah jumlah SDM ideal sesuai dengan hasil analisis beban kerja (ABK) dan peta jabatan yang ada.
- 2) Minimnya sarana dan prasarana fasilitas penunjang riset berupa peralatan mekatronika (mekanika dan elektronika)

**B. RENCANA KERJA TAHUNAN**

Sebagai pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) maka tiap tahun ditetapkan Rencana Kerja (Renja). Dokumen rencana kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang menjelaskan secara garis besar rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 antara lain :

Tabel Rencana Kerja Tahun 2021 LPTK

NO	JENIS OUTPUT	TARGET	SATUAN
1	Prototipe Alat dan Mesin Hasil Riset dan Perekayasa Kelautan	1	Purwarupa
2	Alat dan Mesin hasil Riset dan Perekayasa Kelautan Siap Guna	1	Purwarupa
3	Sarana dan Prasarana Riset Kelautan	1	Unit
4	Kerjasama Riset Kelautan	2	Kesepakatan
5	Layanan Perkantoran Riset Kelautan	1	Layanan
6	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Riset Kelautan	1	Layanan
7	Layanan Umum Riset Kelautan	1	Layanan
8	Layanan Data dan informasi Riset Kelautan	1	Layanan
9	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Riset Kelautan	1	Layanan

Anggaran pelaksanaan kegiatan Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan TA. 2021, terdiri dari anggaran Sarana dan Prasarana Riset Kelautan, Prototipe Alat dan Mesin Hasil Riset dan Perekayasa Kelautan, Alat dan Mesin hasil Riset dan Perekayasa Kelautan Siap Guna, Layanan Dukungan Manajemen Satker, Layanan Perkantoran, dengan total pagu Rp 5.486.826.000.

### C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka dibuat Perjanjian Kinerja LPTK tahun 2021 yang telah menerapkan/menggunakan manajemen kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang berisi langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberi arah bagi para penanggung jawab kegiatan dalam melaksanakan tugas.

Penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Kepala Pusat Riset Kelautan dilakukan pada bulan Januari 2021 dimana terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama, namun, Perjanjian kinerja yang ditanda tangani pada Bulan Januari antara lain :

Tabel Perjanjian Kinerja LPTK Tahun 2021 Bulan Januari

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2021
1	Tersedianya Produk dan Prototipe Hasil Riset Kelautan	1	Prototipe Alat dan Mesin Hasil Perekayasaan Teknologi Kelautan (Purwarupa)	1
		2	Alat dan Mesin hasil Perekayasaan Teknologi Kelautan Siap Guna (Purwarupa)	1
		3	Karya Tulis Ilmiah hasil perekayasaan teknologi kelautan yang dipublikasikan (Dokumen)	3
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Riset Kelautan	4	Sarana Riset Kelautan pada satker LPTK (Unit)	1
3	Tatakelola Pemerintahan yang Baik Pada Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	5	Jejaring dan/atau kerjasama Perekayasaan Teknologi Kelautan yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	4
		6	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LPTK (Persen)	100
		7	Indeks Profesionalitas ASN satker LPTK (Indeks)	73
		8	Penerapan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada satker LPTK (Nilai)	84
		9	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK satker LPTK (Persen)	100

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2021
		10	Rekomendasi hasil pengawasan satker LPTK yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen)	65
		11	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK	80
		12	Nilai IKPA LPTK	89
		13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LPTK	86

#### D. PENGUKURAN KINERJA

##### 1. Rumus Pengukuran

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada penetapan kinerja tahun 2021 dapat tercapai.

Pengukuran kinerja LPTK pada tahun 2021 mengacu pada hasil pengukuran yang telah ditetapkan dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alamat website :<http://kinerjaku.kkp.go.id/app/> Penilaian pencapaian sasaran diukur berdasarkan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS).

Tabel Sistem Pembobotan Atas Tingkat Validasi IKU

No	Validitas IKU	Bobot
1	Lead input	0,1
2	Lead proses	0,2
3	Lag output	0,3
4	Lag outcome	0,4

NPSS adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKU di dalam satu Sasaran Strategis (SS). Status capaian SS yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau (buruk/sedang/baik) ditentukan oleh NPSS. Untuk menghitung NPSS perlu diperhatikan bobot masing-masing IKU terhadap SS tersebut dengan indeks toleransi 0%. Sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKU seperti Tabel

Status capaian NPSS ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:

Baik	Sedang	Buruk
Indeks Capaian >100 %	Indeks Capaian =100%	Indeks Capaian < 100 %

Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan menyepakati standar status kinerja NPSS sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

KLASIFIKASI			STATUS NPSS (Toleransi 0%)
MAXIMIZE	MINIMIZE	STABILIZE	
X<100%	X>100%	X>100% atau X<100%	Buruk
X=100%	X=100%	-	Sedang
X≥100%	X≤100%	X=100%	Baik

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah : Maximixe adalah Semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Minimize adalah Semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Stabilize adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

## 2. Metode Pengukuran

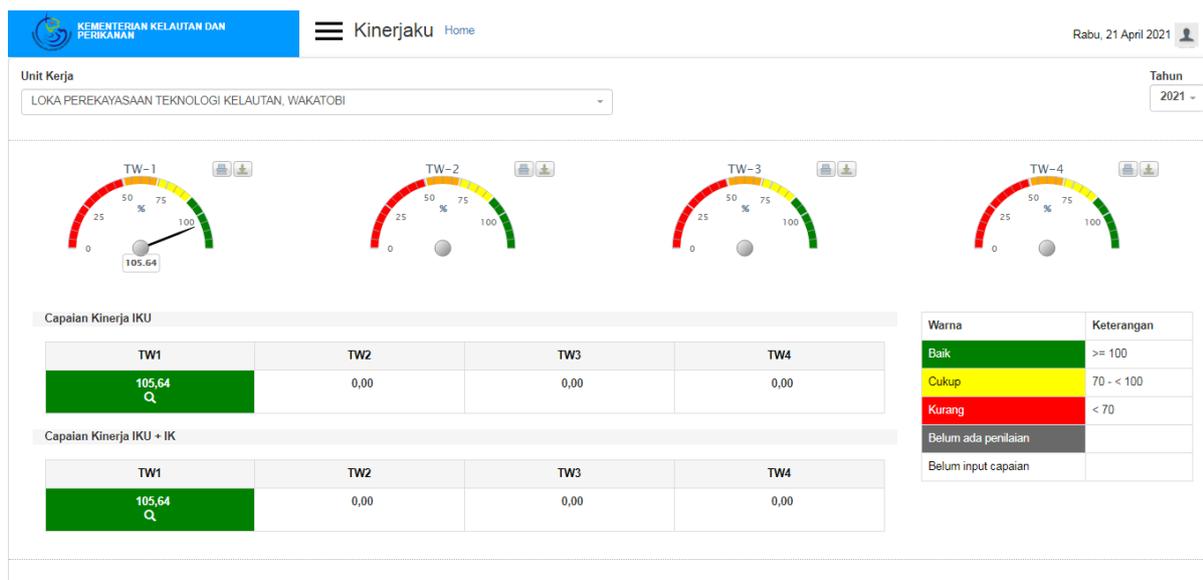
Metode pengukuran kinerja lingkup LPTK dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dikumpulkan data dukung capaiannya dari penanggungjawab masing-masing kegiatan untuk kemudian dilaporkan hasilnya.

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. PRESTASI KINERJA

Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LPTK pada triwulan I tahun 2021 sebesar 105,64%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar Dashboar Kinerjaku LPTK

Selama Triwulan I tahun 2021, dari 13 IKU LPTK, terdapat 2 IKU berstatus hijau dan 1 IKU berstatus kuning, sedangkan sisanya akan diukur pada triwulan selanjutnya.

##### B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Capaian Kinerja Utama (IKU) LPTK Triwulan I tahun 2021 mengalami perubahan dan penyesuaian yang mengacu pada Balanced Score Card (BSC). Capaian indikator kinerja utama pada masing – masing sasaran strategis sampai dengan Triwulan I tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel Target dan Realisasi Output LPTK Triwulan I Tahun 2021

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA		OUTPUT	
				TARGET TW I	REALISASI TW I
1	Tersedianya Produk dan Prototipe Hasil Riset Kelautan	1	Prototipe Alat dan Mesin Hasil Perekayasaan Teknologi Kelautan (Purwarupa)	-	-

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA		OUTPUT	
				TARGET TW I	REALISASI TW I
		2	Alat dan Mesin hasil Perekayasaan Teknologi Kelautan Siap Guna (Purwarupa)	-	-
		3	Karya Tulis Ilmiah hasil perekayasaan teknologi kelautan yang dipublikasikan (Dokumen)	-	-
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Riset Kelautan	4	Sarana Riset Kelautan pada satker LPTK (Unit)	-	-
3	Tatakelola Pemerintahan yang Baik Pada Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	5	Jejaring dan/atau kerjasama Perekayasaan Teknologi Kelautan yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	-	-
		6	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LPTK (Persen)	-	-
		7	Indeks Profesionalitas ASN satker LPTK (Indeks)	-	-
		8	Penerapan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada satker LPTK (Nilai)	84	76.67
		9	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK satker LPTK (Persen)	-	-
		10	Rekomendasi hasil pengawasan satker LPTK yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen)	30	100
		11	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK	-	-
		12	Nilai IKPA LPTK	80	100
		13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LPTK	-	-

### SS.1. : Tersedianya Produk dan Prototipe Hasil Riset Kelautan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 3 (tiga) IKU sebagai berikut :

**IKU 1:** Prototipe Alat dan Mesin Hasil Perekayasaan Teknologi Kelautan (Purwarupa)

Prototipe adalah model dasar dari pengembangan suatu alat dan mesin untuk tujuan demonstrasi atau sebagai bagian dari proses pengembangan. Cara perhitungan untuk IKU ini jumlah purwarupa hasil riset inovasi kelautan yang dihasilkan.

Tabel 0.1. Capaian IKU 1 pada Triwulan I Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target TW I	Capaian TW I
Prototipe Alat dan Mesin Hasil Perekayasaan Teknologi Kelautan	1	-	-

Belum ada capaian pada IKU ini karena ditargetkan tercapai pada TW IV selaras dengan tahun lalu dimana IKU ini jg tercapai diakhir tahun. Kegiatan pendukung IKU ini adalah pengembangan desain aquascaping pada model tanam bambu Laut di *Combbity Garden*.

**IKU 2:** Alat dan Mesin hasil Perekayasaan Teknologi Kelautan Siap Guna (Purwarupa)

Hasil riset teknologi dan inovasi kelautan yang telah diuji coba dilingkungan sebenarnya dan memiliki tingkat kesiapan teknologi yang cukup sehingga dapat dilaksanakan produksi masal oleh industri.

Cara perhitungan untuk IKU ini yaitu Jumlah alat dan mesin hasil riset kelautan yang siap digunakan.

Tabel 0.2. Capaian IKU 2 pada Triwulan I Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target TW I	Capaian TW I
Alat dan Mesin hasil Perekayasaan Teknologi Kelautan Siap Guna	1	-	-

Belum ada capaian pada IKU ini karena ditargetkan tercapai pada TW IV. Tidak ada pembandingan dengan tahun lalu, dikarenakan IKU ini tidak ada pada tahun lalu. Kegiatan pendukung IKU ini adalah Riset Teknologi Sistem Digital Fisheries untuk mendukung Perikanan Tangkap.

**IKU 3:** Karya Tulis Ilmiah hasil perekayasaan teknologi kelautan yang dipublikasikan (Dokumen)

IKU ini didefinisikan sebagai tulisan yang disusun berdasarkan data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh peneliti/perekayasa Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

yang telah diterbitkan di media jurnal terakreditasi, prosiding, bunga rampai, buku hasil riset, naskah akademik dan buletin ilmiah yang diterbitkan dalam negeri dan/atau luar negeri pada tahun berjalan di tahun 2021. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut:

Tabel 0.3. Capaian IKU 3 pada Triwulan I Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target TW I	Capaian TW I
Karya Tulis Ilmiah hasil perekayasaan teknologi kelautan yang dipublikasikan	3	-	-

Belum ada capaian pada IKU ini karena ditargetkan tercapai pada TW IV selaras dengan tahun lalu dimana IKU ini jg tercapai diakhir tahun.

SS.2. : Tersedianya Sarana dan Prasarana Riset Kelautan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 1 (satu) IKU sebagai berikut :

IKU 4 : Sarana Riset Kelautan pada satker LPTK (Unit)

Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup LPTK. Cara perhitungan untuk IKU ini yaitu Jumlah Sarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal

Tabel 0.3. Capaian IKU 4 pada Triwulan I Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target TW I	Capaian TW I
Sarana Riset Kelautan pada satker LPTK	1	-	-

Realisasi IKU 4 ditargetkan tercapai pada triwulan selanjutnya yakni pengadaan fasilitas riset. Sama dengan tahun lalu di triwulan yang sama IKU ini jg ditargetkan realisasinya pada TW II. Kegiatan pendukung IKU ini adalah Sarana riset kelautan.

SS.3. : Tatakelola Pemerintahan yang Baik Pada Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 9 (sembilan) IKU sebagai berikut :

IKU 5 : Jejaring dan/atau kerjasama Perekayasaan Teknologi Kelautan yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)

Jejaring dan kemitraan penelitian dan pengembangan untuk identifikasi dan mendapatkan strategi penyelesaian permasalahan dan kendala pengelolaan

sumber daya kelautan dan perikanan. Teknik menghitungnya yaitu akumulasi Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerjasama yang dijalin oleh satuan kerja lingkup LPTK yang di fasilitasi oleh Sekretariat BRSDM pada tahun yang masih berjalan dan terbentuk di tahun 2021. Dukungan jejaring dan kemitraan antara lain dalam bentuk dokumen kerjasama yang terjalin dengan stakeholder. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut :

Tabel 0.5 Capaian IKU 5 pada Triwulan I Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target TW I	Capaian TW I
Jejaring dan/atau kerjasama Perencanaan Teknologi Kelautan yang disepakati dan ditindaklanjuti	4	-	-

Belum ada capaian pada IKU pada triwulan ini. Pada tahun sebelumnya di triwulan yang sama capaian IKU ini adalah satu jejaring yakni kerjasama dengan Stasiun Meterologi Maritim Kelas II Kendari. Kegiatan pendukung IKU ini adalah kerjasama riset kelautan.

**IKU 6 : Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LPTK (Persen)**

Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan perkantoran. Cara perhitungan untuk IKU ini yaitu Persentase perbandingan jumlah realisasi dokumen hasil layanan dengan jumlah target dokumen hasil layanan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut:

Tabel 0.6. Capaian IKU 6 pada Triwulan I Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target TW I	Capaian TW I
Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LPTK	100	-	-

Belum ada capaian pada IKU ini karena ditargetkan tercapai pada TW IV. Tidak ada pembandingan dengan tahun lalu, dikarenakan IKU ini tidak ada pada tahun lalu. Kegiatan pendukung IKU ini adalah Layanan Perkantoran Riset Kelautan.

## IKU 7 : Indeks Profesionalitas ASN satker LPTK (Indeks)

Indikator ini merupakan IKU baru dan dihitung berdasarkan:

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatir Sipil Negara.

Formulasi IKU ini terdiri dari 4 komponen dengan bobot sebagai berikut :

1. Kualifikasi (25%), meliputi pendidikan terkini pegawai dengan ketentuan sesuai SK pangkat terakhir atau SK pencantuman gelar yang sudah di update pada aplikasi SIMPEG online KKP.
2. Kompetensi (40%), meliputi kompetensi pegawai yang mengikuti diklat baik dari Diklatpim, ataupun diklat fungsional yang sudah di update pada aplikasi SIMPEG online KKP.
3. Kinerja (30%), meliputi penilaian prestasi kerja online KKP dan dikolaborasikan dengan database kepegawaian.
4. Disiplin (5%), meliputi disiplin pegawai yang diambil baik dari yang pernah/tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin yang telah di update pada aplikasi SIMPEG online KKP.

Tabel 0.7. Capaian IKU 7 pada Triwulan I Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target TW I	Capaian TW I
Indeks Profesionalitas ASN satker LPTK	73	-	-

Berdasarkan tabel diatas capaian IP ASN LPTK pada TW I belum ada capaian. Sama dengan tahun sebelumnya IKU ini dapat dilihat capaiannya melalui aplikasi IP-ASN dengan situs <http://ropeg.kkp.go.id:4080/?#/ip-asn/eselon> pada triwulan IV. Kegiatan yang mendukung IKU ini adalah Layanan Umum Riset Kelautan.

IKU 8 : Penerapan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada satker LPTK (Nilai)

Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur capaian kinerja berdasarkan sistem Manajemen Pengetahuan, dimana dapat dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai MP} = \text{Keikutsertaan pegawai} + \text{Keaktifan} + \text{Jumlah dokumen MP yang di upload}$$

Bobot :

Keikutsertaan pegawai	= 10%
Keaktifan	= 70%
Jumlah dokumen MP yang di upload	= 20%

Tabel 0.8. Capaian IKU 8 pada Triwulan I Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target TW I	Capaian TW I
Penerapan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada satker LPTK	84	84	76.67

Capaian IKU MP pada TW I sedikit dibawah target yang direncanakan yakni 76.67% dari target 84%. Tidak tercapainya IKU ini diakibatkan masih kurangnya keaktifan dari Pejabat di lingkup LPTK dalam membagikan informasi pada bitrix24, keaktifan dalam MP akan ditingkatkan pada triwulan selanjutnya sehingga target MP di TW II dapat tercapai. Kegiatan pendukung IKU ini adalah Layanan Perkantoran Riset Kelautan. Adapun rincian Presentase Manajemen Pengetahuan terstandar Bitrix24 KKP lingkup LPTK sesuai dengan memo yang dikeluarkan oleh Pusriskel sebagai berikut :

DOKUMEN				KEAKTIFAN			
Dokumen	Capaian	Target	%	Level	Capaian (Aktif)	Target (Aktif)	%
Perjanjian Kinerja	1	1	100%	Kepala UPT	2	3	66.67%
Manual IKU	1	1	100%	Supervisor	6	9	66.67%
Rencana Aksi	1	1	100%				
Laporan Kinerja	1	1	100%				
<b>Rata-rata</b>			<b>100%</b>	<b>Rata-rata</b>			<b>66.67%</b>

KEIKUTSERTAAN				PENILAIAN			
Level	Capaian	Target	%	Komponen	Nilai	Bobot	%
Kepala UPT	1	1	100%	Dokumen	100.00%	20%	20.00%
Supervisor	3	3	100%	Keikutsertaan	100.00%	10%	10.00%
Pelaksana	6	6	100%	Keaktifan	66.67%	70%	46.67%
<b>Rata-rata</b>			<b>100%</b>	<b>Presentase Capaian</b>			<b>76.67%</b>

**IKU 9 : Persentase penyelesaian temuan LHP BPK satker LPTK (Persen)**

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK satker merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Cara perhitungan untuk IKU ini yaitu persentase perbandingan jumlah penyelesaian temuan TA 2020 dengan jumlah temuan TA 2020. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut:

Tabel 0.6. Capaian IKU 9 pada Triwulan I Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target TW I	Capaian TW I
Persentase penyelesaian temuan LHP BPK satker LPTK	100	-	-

Belum ada capaian pada IKU ini karena ditargetkan tercapai pada TW IV. Pada tahun lalu di triwulan yang sama IKU ini juga belum ada capaian. Kegiatan pendukung IKU ini adalah Pelayanan Keuangan.

**IKU 10 : Rekomendasi hasil pengawasan satker LPTK yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen)**

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada LPTK berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2019 s.d. Triwulan III Tahun 2020 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BRSDM yang menjadi objek pengawasan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut:

Tabel 0.6. Capaian IKU 10 pada Triwulan I Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target TW I	Capaian TW I
Rekomendasi hasil pengawasan satker LPTK yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	65	30	100

Capaian IKU ini pada TW I bersumber dari memo yang dikeluarkan oleh Pusriskel terkait Penyampaian capaian rekomendasi hasil pengawasan satker lingkup Pusriskel dimana LPTK mendapat nilai 100. Kegiatan pendukung IKU ini adalah Pelayanan Keuangan.

#### IKU 11 : Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam PK. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut:

Tabel 0.6. Capaian IKU 11 pada Triwulan I Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target TW I	Capaian TW I
Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK	80	-	-

Belum ada capaian pada IKU ini karena ditargetkan tercapai pada TW IV. Tidak ada pembandingan dengan tahun lalu, dikarenakan IKU ini tidak ada pada tahun lalu. Kegiatan pendukung IKU ini adalah Pelayanan Monitoring dan Evaluasi.

#### IKU 12 : Nilai IKPA LPTK

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerpan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus. Ada 12 formulasi sebagai bahan untuk penghitungan nilai kinerja anggaran LPTK dengan mengacu pada DJPB, yaitu sebagai berikut :

##### 1. Revisi DIPA

- a. Indikator Revisi DIPA digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran oleh K/L dengan menghitung rasio jumlah pengajuan revisi terhadap jumlah DIPA yang dikelola.
- b. Jenis revisi yang mejadi objek penilaian kinerja adalah revisi DIPA pagu tetap, tidak termasuk revisi karena kesalahan administrasi.
- c. Semakin rendah angka persentase revisi DIPA yang diperoleh, maka semakin baik kinerja perencanaan anggaran pada K/L tersebut.

$$\left( \frac{\sum \text{Target Revisi DIPA}}{\sum \text{Revisi DIPA}} \right)$$

##### 2. Deviasi RPD ( Halaman III DIPA)

- a. Indikator Deviasi Halaman III DIPA digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran, dengan mengukur rasio tingkat deviasi antara realisasi anggaran dibandingkan dengan rencana penarikan pada halaman III DIPA

- b. Semakin rendah persentase deviasi (angka absolut) yang diperoleh, maka semakin baik kualitas rencana penarikan halaman III DIPA dan kinerja realisasi anggaran K/L

$$\text{Rata-rata } | | \left( \frac{\text{Realisasi Penarikan Dana} - (\text{Perencanaan Hal III DIPA})}{\text{Perencanaan Hal III DIPA}} \right) | |$$

### 3. Pengelolaan UP

- a. Indikator pengelolaan UP digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan Uang Persediaan terkait ketepatan waktu pertanggungjawabannya. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio pengajuan SPM GUP/PTUP tepat waktu dibandingkan dengan total SPM GUP/PTUP
- b. Pengajuan SPM GUP/PTUP dapat dikategorikan tepat waktu apabila disampaikan ke KPPN dalam 1 bulan (30 hari kalender). Pengajuan SPM GUP sekurang-kurangnya telah digunakan sebanyak 50% dari besaran UP yang dimintakan
- c. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja pengelolaan UP

$$\left( \frac{\sum \text{SPM GUP yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{SPM GUP}} \right) \times 100$$

### 4. Rekon LPj Bendahara

- a. Indikator LPJ Bendahara digunakan untuk menilai kinerja Bendahara Pengeluaran dalam penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio pengajuan LPJ tepat waktu dibandingkan dengan total LPJ yang disampaikan ke KPPN
- b. Pengajuan LPJ Bendahara dapat dikategorikan tepat waktu apabila disampaikan ke KPPN maksimal s.d. tanggal 10 awal bulan berikutnya.
- c. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyampaian LPJ Bendahara

$$\left( \frac{\sum \text{Data LPJ Bendahara yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

### 5. Data Kontrak

- a. Indikator penyampaian data kontrak digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan dalam mengadministrasikan data kontrak khususnya terkait penyampaian ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio data kontrak tepat waktu dibandingkan dengan total data kontrak yang diajukan ke KPPN
- b. Penyampaian data kontrak dapat dikategorikan tepat waktu apabila disampaikan ke KPPN maksimal 5 hari kerja sejak tanggal penandatanganan kontrak

- c. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyampaian data kontrak

$$\left( \frac{\sum \text{Data kontrak yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{data kontrak yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

#### 6. Penyelesaian Tagihan

- a. Indikator penyelesaian tagihan digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelolaan keuangan dalam mengadministrasikan tagihan kontraktual yang telah jatuh tempo hingga diajukan SPM atas tagihan tersebut ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio SPM tepat waktu dibandingkan dengan total SPM yang diajukan KPPN
- b. SPM penyelesaian tagihan dapat dikategorikan tepat waktu apabila SPM LS (Non-Belanja Pegawai) disampaikan ke KPPN maksimal 17 hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pembayaran
- c. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyelesaian tagihannya

$$\left( \frac{\sum \text{Tagihan yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Total Tagihan}} \right) \times 100$$

#### 7. Penyerapan Anggaran

- a. Indikator penyerapan anggaran digunakan untuk menilai kualitas penyerapan anggaran berdasarkan target penyerapan pada tiap triwulan. Penilaian dihitung berdasarkan persentase capaian realisasi dibandingkan dengan target penyerapan anggaran pemerintah
- b. Target penyerapan tahun 2017 yakni TW 1: 15%; TW 2: 40%; TW 3: 60%; TW 4: 90%
- c. Kinerja penyerapan anggaran diharapkan tidak hanya berfokus pada capaian realisasi anggarannya, melainkan juga capaian output setiap K/L, dan dilakukan secara efisien dan efektif
- d. Penyerapan anggaran yang dapat mencapai target, maka nilainya semakin baik

$$\left( \frac{\sum \text{Realisasi Anggaran}}{\sum \text{Pagu}} \right) \times 100$$

#### 8. Retur SP2D

- a. Indikator SP2D digunakan untuk menilai kualitas SPM yang diajukan khususnya berkaitan dengan ketepatan data supplier pada SPM. Penilaian kinerja dihitung dengan mengukur rasio jumlah SP2D yang diretur SP2D yang diterbitkan
- b. Hal-hal yang sering menyebabkan retur SP2D antar lain kesalahan nomor rekening, kesalahan nama penerima, nomor rekening tidak aktif dll

- c. Semakin rendah persentase retur SP2D yang diperoleh, maka semakin baik kualitas SPM yang diajukan ke KPPN

$$\left( \frac{\sum \text{Retur SP2D}}{\sum \text{SP2D Terbit}} \right) \times 100$$

#### 9. Perencanaan Kas

- a. Indikator Renkas/RPD harian digunakan untuk menilai kinerja manajemen pembayaran K/L, khususnya pada SPM yang diwajibkan disampaikan Renkas/RPD sebelum penyajian SPM. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu Pengajuan SPM dibandingkan Renkas/RPD yang diajukan
- b. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja kesesuaian pengajuan SPM dengan Renkas/RPD harian

$$\left( \frac{\sum \text{data Renkas yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Renkas yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

#### 10. Pengembalian SPM

- a. Indikator pengembalian SPM digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan dalam menjamin kebenaran SPM yang diajukan ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio SPM salah dibandingkan dengan total SPM yang disampaikan ke KPPN
- b. Indikator pengembalian SPM digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan dalam menjamin kebenaran SPM yang diajukan ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio SPM salah dibandingkan dengan total SPM yang disampaikan ke KPPN

$$\left( \frac{\sum \text{SPM salah}}{\sum \text{Total SPM yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

#### 11. Dispensasi Penyampaian SPM

- a. Indikator pengembalian SPM digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan dalam menjamin kebenaran SPM yang diajukan ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio SPM salah dibandingkan dengan total SPM yang disampaikan ke KPPN
- b. Indikator pengembalian SPM digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan dalam menjamin kebenaran SPM yang diajukan ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio SPM salah dibandingkan dengan total SPM yang disampaikan ke KPPN

$$\left( \frac{\sum \text{Dispensasi SPM}}{\sum \text{Total SPM yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

#### 12. Pagu Minus

- a. Indikator pagu minus Belanja Pegawai digunakan untuk menilai kualitas perencanaan dan penganggaran K/L khususnya terkait Belanja Pegawai, dengan mengukur rasio pagu minus Belanja Pegawai terhadap total Pagu Belanja Pegawai K/L

- b. Indikator pagu minus Belanja Pegawai digunakan untuk mengukur kinerja secara tahunan.
- c. Semakin rendah angka persentase pagu minus yang diperoleh, maka semakin baik kinerja perencanaan anggaran Belanja Pegawai pada K/L tersebut

$$\left( \frac{\sum \text{Pagu Minus}}{\sum \text{Pagu}} \right) \times 100$$

Nilai efisiensi anggaran diambil dari nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI dalam aplikasi monev PA dengan alamat <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/>

Tabel 0.9. Capaian IKU 12 pada Triwulan I Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target TW I	Capaian TW I
Nilai IKPA LPTK	89	80	100

Berdasarkan tabel diatas capaian nilai pelaksanaan anggaran (IKPA) pada TW I adalah 100. Berbeda dengan tahun sebelumnya tidak adanya capaian dikarenakan adanya kendala pada aplikasi monev PA yang mengakibatkan nilai yang dikeluarkan masih belum valid untuk dijadikan capaian. Adapun kegiatan pendukung Iku ini adalah Pelayanan perencanaan dan penganggaran.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN

### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM				
1	103	403820	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	Nilai	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	38.22	100.00	0.00	100.00	73.00	73%	100.00
				Bobot	5	0	5	10	8	5	5	15	10	0	5	0	5				
				Nilai Akhir	5.00	0.00	5.00	10.00	8.00	5.00	5.00	15.00	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00				
				Nilai Aspek	200.00			100.00				112.74				100.00					

Disclaimer:

Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

IKU 13 : Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LPTK

Nilai kinerja anggaran didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya.

Nilai efisiensi anggaran diambil dari nilai yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dalam aplikasi SMART DJA dengan alamat <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Tabel 0.10. Capaian IKU 13 pada Triwulan I Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target TW I	Capaian TW I
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LPTK	86	-	-

Belum ada capaian pada IKU ini karena Aplikasi SMART DJA masih dalam tahap pengembangan, kondisi saat ini penginputan di level satker dan masih terdapat kendala gagal login, tidak ada nilai NKA, tidak ada dashboard yang menampilkan capaian-capaian satker, sehingga masih membutuhkan perbaikan, ditargetkan tercapai pada TW IV. Kegiatan pendukung IKU ini adalah. Kegiatan pendukung IKU ini adalah Pelayanan Monitoring dan Evaluasi.

### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan anggaran harus dikelola secara optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan, sampai dengan TW I T.A 2021 penyerapan anggaran LPTK Wakatobi adalah sebesar Rp 1.312.752.718,- atau sebesar 23,93%. Berikut tabel realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2021 :

Tabel 0.4. Tabel realisasi anggaran TW I TA. 2021

Kode Nama dan Kegiatan	Keuangan		
	Pagu	Realisasi	%
Prototipe Alat dan Mesin Hasil Riset dan Perekayasaan Kelautan	200.000.000	14.798.910	7,40%
Alat dan Mesin hasil Riset dan Perekayasaan Kelautan Siap Guna	450.000.000	15.117.500	3,36%
Sarana dan Prasarana Riset Kelautan	100.000.000	0	0,00%
Kerjasama Riset Kelautan	45.120.000	12.726.400	28,21%
Layanan Perkantoran Riset Kelautan	4.435.734.000	1.262.507.733	28,46%
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Riset Kelautan	70.144.000	0	0,00%
Layanan Umum Riset Kelautan	111.288.000	4.839.200	4,35%
Layanan Data dan informasi Riset Kelautan	30.152.000	0	0,00%
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Riset Kelautan	44.388.000	2.762.975	6,22%
<b>Total</b>	<b>5.486.826.000</b>	<b>1.312.752.718</b>	<b>23,93%</b>

Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa selama TW I Tahun 2021 IKU yang disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja telah diakomodir dan didukung dengan ketersediaan anggaran. Pengalokasian anggaran yang tepat dapat mendorong kinerja pencapaian output yang baik.

Dalam perjalanannya terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Selama TW I belum terdapat kendala terkait serapan anggaran.

Adapun Rekomendasi yang dilakukan agar meminimalisir permasalahan antara lain:

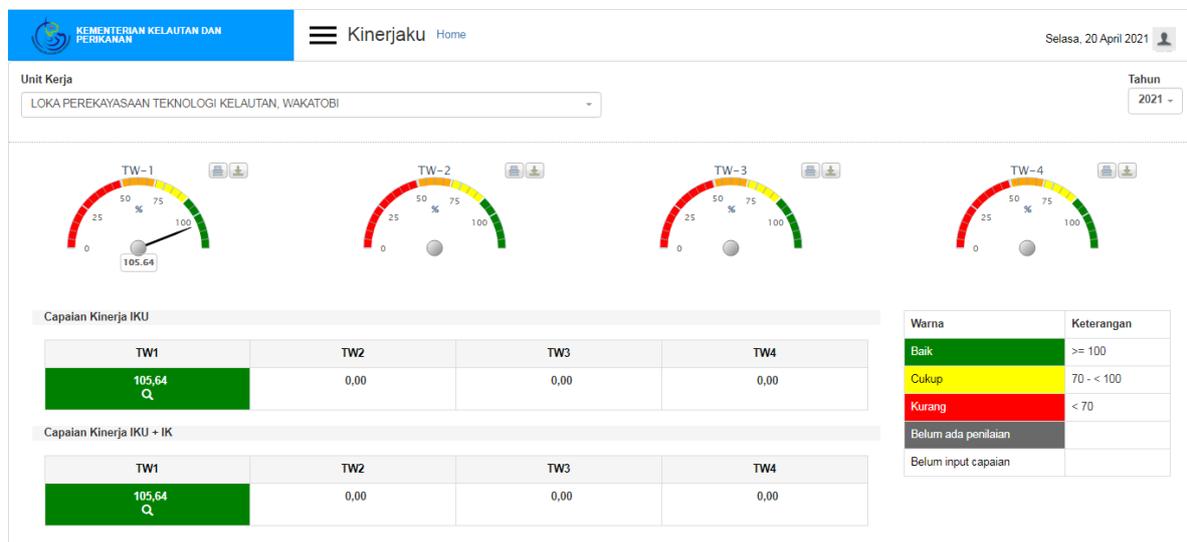
1. Pada TW II terus mengoptimalkan kinerja dengan serapan yang baik.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. CAPAIAN KINERJA UTAMA

Pada Tahun 2021, LPTK memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 3 Sasaran Strategis dan 13 Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja LPTK Triwulan I Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator/KPI*) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LPTK pada Triwulan I Tahun 2021 sebesar 105,64%, sebagaimana dashboard kinerja sebagai berikut:



Gambar . Dashboard Kinerjaku LPTK

Selama Triwulan I Tahun 2021, dari 13 IKU LPTK, terdapat 3 IKU yang memiliki capaian, sisanya akan diukur pada Triwulan selanjutnya. Rincian target dan realisasi dari 3 IKU tersebut adalah :

1. IKU Penerapan sistem pengetahuan terstandar pada satker LPTK (%) memiliki target triwulan I 84% namun dengan capaian 76.67%
2. IKU Rekomendasi hasil pengawasan satker LPTK yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen) memiliki target triwulan I 30 dengan capaian 100
3. IKU Nilai IKPA LPTK memiliki target triwulan 80 dengan capaian 100

## B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Permasalahan dalam pencapaian IKU LPTK diantaranya :

1. Capaian IKU Penerapan sistem pengetahuan terstandar pada satker LPTK (%) triwulan I capaiannya 76.67% dengan target 84%. Capaian ini dibawah target akibat kurangnya keaktifan pada bitrix24

Sebagai Tindaklanjut dari permasalahan diatas :

1. Meningkatkan nilai keaktifan dengan cara mensosialisasikan pentingnya penerapan MP pada bitrix24 kepada seluruh pegawai.

## **LAMPIRAN**

- PERJANJIAN KINERJA



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KOMPLEK BINA SAMUDERA JALAN PASIR PUTIH I ANCOL TIMUR LANTAI IV JAKARTA 14430  
TELEPON (021) 64700755 EXT. 3120, FAKSIMILE (021) 64711654  
LAMAN [www.pusriskel.litbang.kkp.go.id](http://www.pusriskel.litbang.kkp.go.id) POS ELEKTRONIK : [pusriskel@kkp.go.id](mailto:pusriskel@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN  
PUSAT RISET KELAUTAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Akhmatul Ferlin**

Jabatan : Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Pusat Riset Kelautan

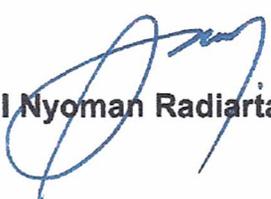
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua  
Kepala Pusat Riset Kelautan

  
**I Nyoman Radiarta**

Pihak Pertama  
Kepala Loka Perekayasaan  
Teknologi Kelautan

  
**Akhmatul Ferlin**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN**  
**PUSAT RISET KELAUTAN**

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2021	
1	Tersedianya Produk dan Prototipe Hasil Riset Kelautan	1	Prototipe Alat dan Mesin Hasil Perekayasaan Teknologi Kelautan (Purwarupa)	1	
		2	Alat dan Mesin hasil Perekayasaan Teknologi Kelautan Siap Guna (Purwarupa)	1	
		3	Karya Tulis Ilmiah hasil perekayasaan teknologi kelautan yang dipublikasikan (Dokumen)	3	
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Riset Kelautan	4	Sarana Riset Kelautan pada satker LPTK (Unit)	1	
3	Tatakelola Pemerintahan yang Baik Pada Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	5	Jejaring dan/atau kerjasama Perekayasaan Teknologi Kelautan yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	4	
		6	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LPTK (Persen)	100	
		7	Indeks Profesionalitas ASN satker LPTK (Indeks)	73	
		8	Penerapan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada satker LPTK (Nilai)	84	
		9	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK satker LPTK (Persen)	100	
		10	Rekomendasi hasil pengawasan satker LPTK yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen)	65	
		11	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK	80	
		12	Nilai IKPA LPTK	89	
			13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LPTK	86

**Program** : Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan  
**Kegiatan** : Riset Kelautan  
**Satker** : Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan  
**Anggaran Tahun 2021** : Rp. 5.667.826.000,-

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
1	Prototipe Alat dan Mesin Hasil Riset dan Perekayasaan Kelautan	200.000.000
2	Alat dan Mesin hasil Riset dan Perekayasaan Kelautan Siap Guna	500.000.000
3	Sarana dan Prasarana Riset Kelautan	200.000.000
4	Kerjasama Riset Kelautan	50.120.000
5	Layanan Perkantoran Riset Kelautan	4.435.734.000
6	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Riset Kelautan	70.144.000
7	Layanan Umum Riset Kelautan	131.288.000
8	Layanan Data dan informasi Riset Kelautan	30.152.000
9	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Riset Kelautan	50.388.000
<b>JUMLAH</b>		<b>5.667.826.000</b>

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua  
Kepala Pusat Riset Kelautan

I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama  
Kepala Loka Perekayasaan  
Teknologi Kelautan

Akhmatul Ferlin